DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

sar Hukum

Nomor SOP :	:	000.9.3.3/ 9 /II/XXX/2025
Tanggal Pembuatan:	1:	13 Januari 2025
Tanggal Revisi :	1	
Tanggal Pengesahan :	:	3 Januari 2025
Disahkan oleh:	:	(PRIYATNO DARMADI,S.Sos, M.Si) NIP. 197012091991011001
47		KOMER

1501	Hukum	Kuaiiiikasi r	elaksalla
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	1. Ke	epala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan	2.1	ekretaris
2_1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan		abid Informasi dan Komunikasi Publik
	Informasi Publik;		ub Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik ub Koordinasi pengelolaan Opini dan aspirasi Publik
3.	Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur		Pranata Humas Muda)
4	penyelesaian sengketa informasi Publik;	•	raf PPID
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	2000	25 VA 1945 Very Article 4991
	kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;		nas Instansi yang terkait
5.	Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar	8. Pu	ublik/ Lembaga Berbadan Hukum
	Layanan Informasi Publik Desa;		
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar		
E2431:	Layanan Informasi publik;		
7.	Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 22 Februari 2022		
	Tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan		
	Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU.		

Kualifikasi Pelaksana

A. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

		r			1			
No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung		Keterangan
NO	Kegiatan	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.				1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	

		 value and the second	 	Andrew Control of the		
2	Mengklasifikasikan seluruh		1. UU No 14	Secara	DIDP yang telah	
	informasi dan dokumentasi		Tahun2008;	berkala,	diklasifikasi	
	yang telah dikumpulkan dan		2. UU No 25	serta merta	kebenarannya	
	mengidentifikasikannya		Tahun2009;	dan setiap		
	berdasarkan sifat informasi		3. UU No 23	saat		
	dan dokumentasi, selain itu		Tahun2013;			
	juga mengklasifikasikan		4. PP 61 Tahun			
	informasi dan dokumentasi		2010;			
	yang dikecualikan dengan		5. Perki No 1			
	kategori sebagaimana yang		Tahun2010;			
	telah ditetapkan melalui UU		6. Perki No 1			
	No. 14 Tahun 2008 Pasal 17		Tahun2013.			
	dan Pasal 18. Pengujian					
	tentang konsekuensi dengan					
	seksama dan penuh ketelitian					
	sebelum menyatakan					
	Informasi dan Dokumentasi					
	Publik tertentu dikecualikan					
	oleh setiap orang.					
3	Mendokumentasikan informasi		Alat tulis	Secara	DIDP	
	publik dalam bentuk softcopy		kantor	berkala,		
	dan tempat penyimpanan			serta merta		
	dokumen dalam bentuk hard			dan setiap		
	copy dengan tata cara seperti		2.	saat		
	mengarsip dokumen dan					
	dipisahkan sesuai klasifikasi					
	informasi dan dokumentasi					-
	wajib, secara berkala, serta					
Let	merta dan setiap saat. Perlu					30
	dibuat daftar Informasi dan					
	dokumentasi yang					

	dikecualikan.					
4	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.		Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk Menetapkan DIP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pelaksana	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengunggah DIDP ke websiteresmi Kemendagri dan Pemerintahan Daerahmaupun melalui sarana informasi lainnya.		Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIDPdi <i>website</i> Kemendagridan Pemerintah Daerah	

3. Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik

		Pelaksana					Pendukung		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pelaksana	Kompone n dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.					(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permohona n informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pelaksana.					Semua data- data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikaninformasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pelaksana.		↓	> [DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.	•			Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

C. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekwensi Informasi Publik

			Pelaksa				Pendukung		T
10	Kegiatan	PPI D Utama dan PPI D Pelaksana	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteranga
	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan infromasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yangbersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum			**	(4)	Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

	Tim Pertimbangan Pelayanan						
	Informasi dinyatakan rahasia,						
	maka PPID membuat surat						
	penolakan kepada pemohon						
	informasi.						
4	Memberikan informasi yang			Informasi/	Maksimal	Informasi	
	diminta oleh			Dokumen yang	diberikan	publik yang	Y Y
	pemohon informasi dengan			diminta oleh	perpanjangan	diminta	
	menandatangani tanda bukti			Pemohon	pemenuhan	oleh Pemohon	
	penerimaan atau memberikan			Informasi atau	permohonan	Informasi	
	surat penolakan kepada pemohon	A		surat	informasi	atau surat	
	jika status informasi/dokumen			penolakan	selama 7	penolakan	
	dinyatakan rahasia.			jika informasi/	(tujuh) hari		
				dokumen	sejak		
				tersebut	pemberitahu		
				dikategorikan	an tertulis		
				rahasia	diberikan		
					dan tidak		
					dapat		
					diperpanjang		
			2.7		lagi		

. Standar Operasional Prosedur Keberatan Informasi Publik

			Pelak	sana		CAN IN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	Pendukung		
0	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteran
	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke			anner to the first	No. of the second second	(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Waktu Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
	nomor fax PPID. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID		→	→		Semua data- data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan	

	V 200 Harris - 100							_
							softcopy	
3	Memeriksa formulir pengajuan				Berkas	Pada hari dan	Daftar surat	
	keberatan dari Para Pemohon				pengajuan	jam kerja	yang harus	
	Informasi dan memerintahkan				keberatan		diberikan	
	PPID dan PPID Pelaksana untuk			Structurantellists	pelayanan		kepada PPID	1 /
	menjawab permohonan informasi				informasi yang		dan PPID	1. 7
					telah diisi		Pelaksana	
					lengkap			
4	Memerintahkan kepada PPID dan		 		(1) Berkas	Pada hari dan	Surat perintah	
	PPID Pelaksana untuk memenuhi		10-20-41		pengajuan	jam kerja	tertulis	
	permintaan informasi dari				keberatan		kepada PPID	
	Pemohon Informasi.	Constant of the Constant of th	1		pelayanan		dan PPID	
					informasi		Pelaksana	
					yang telah diisi		untuk	
				1	lengkap,		memenuhi	
					(2) DIP		permintaan	
					yang telah		pemohon	
					diumumkan		informasi	
							yang	
				İ.	Į		mengajukan	
				1			keberatan	
							pelayanan	
							informasi	
							publik	
5	Memberikan informasi yang		 		Dokumen/infor	Pada hari dan	Informasi	
	diminta oleh pemohon informasi			Sections	masi	jam kerja	publik	
	kepada Atasan PPID jika informasi		ļ		yang dimaksud		yang diminta	
	yang dimaksud telah masuk DIP.			No. 2000	oleh Pemohon		oleh Pemohon	
3	Atasan PPID akan menjawab				Informasi atau		Informasi atau	
	pengajuan keberatan kepada				rekomendasi		surat	
	pemohon informasi. Jika informasi				surat penolakan		penolakan	

yang diinginkan pemohon	dari PPID atau	kepada	
informasi tidak termasuk dalam	PPID	Pemohon	
DIP yang telah diumumkan, karena	Pelaksana	Informasi	
informasi belum tersedia atau	karena		. 7
termasuk informasi yang	informasi yang		
dikecualikan, maka diberikan	diminta		
surat penolakan kepada Pemohon	merupakan		
Informasi.	informasi yang		
	dikecualikan		

Standar Operasional Porsedur Fasilitasi Sengketa Informasi

П	Kegiatan		Pelaksa	ana		Pe	ndukung		T
Vo		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelak s ana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteranga
	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohon an informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapa n tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengket akan	
	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana		×				Diajukan dalam waktu paling lambat		

	terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFUyang sesuai dengan kebutuhan			14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	r.
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID				
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.				

Daftar Permohonan Informasi Publik

	Uraian Prosedur	Pelaksana									
No		Staf PPID	Kasi Pengelolaan & Informasi Publik	Kabid PIOAP	Sekretaris	Kadin/ PPID	Pemohon	SKPD/PPID Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima surat permohonan informasi	<u> </u>					+		KTP /ID Card,fotocopy dilegalisir Lembaga Berbadan Hukum	10 menit	Register Data Pemohon
2.	Mencatat data pemohon (registrasi)	Mulai	The state of the s						KTP /ID Card,fotocopy dilegalisir Lembaga Berbadan Hukum	10 menit	Register Data Pemohon
3.	Memberikan tanda bukti pemohon								KTP /ID Card,fotocopy dilegalisir Lembaga Berbadan Hukum	30 menit	Register Data Pemohon
4.	Mengecek status informsi yang diminta berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik								Berkas Data Pemohon Informasi	10 menit Sd 3 hari	Berkas Data Pemohon Informasi telah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008
5.	Mengajukan berkas permohonan informasi kepada ketua PPID Utama melalui Sekretaris		- L		-				Berkas sudah di paraf Sekretaris	15 menit	Berkas Permohonan Informasi
6.	Berkas Permohonan Informasi naik Ke ketua PPID Utama					\wedge	TIDAK		Berkas sudah di tindak lanjuti ketua PPID	15 menit	Berkas selesai di tindak lanjuti
7.	Berkas Permohonan Informasi untuk segera ditindaklanjuti					YA			Berkas segera di tindak lanjuti Kabid Pengelolaan linformasi Opini Aspirasi Publik	2 Jam	Permohonan Informasi
8.	Berkas Permohonan Informasi diolah sesuai kebutuhan								Berkas di olah oleh staf PPID	15 menit	Berkas Pemohon Informasi telah diolah
9.	Berkas Permohonan Informasi selesai diolah							→	Berkas Pemohon di tindak lanjuti oelh SKPD/ PPID Pelaksana	10 Hari + 7 Hari	Berkas Permohonan Informasi
10.	Menerima Jawaban permohonan informasi							-	Berkas Permohonan Informasi yang sudah ditindak lanjuti Oleh SKPD/ PPID Pelaksana		Berkas yang dari SKPD/ PPID Pelaksana di Kirim Ke PPID Utama
11.	Pemohon mengambil berkas Permohonan informasi						Selesai		Jawaban berkas Permohonan Informasi		